

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan kata anarkisme secara serampangan sudah lama diamplifikasi media di Indonesia. Di zaman Hindia-Belanda, tulisan Soekarno berjudul *Anarchisme* menunjukkan bagaimana anarkisme disalahpahami sejak dulu (Prawirodirdjo et al., 2019). Tulisan yang terbit pada Juli 1932 di majalah Fikiran Ra'jat itu menyebut anarkisme Sebagai teori individualisme yang menghargai manusia lebih dari masyarakat. Lebih konyolnya, di tulisan yang sama, Soekarno menyebut kaum anarkis sangat menentang minuman keras (Prawirodirdjo et al., 2019). Kian hari, media bahkan menyamakan kata anarkisme sebagai kekacauan, ketidakteraturan, atau chaos. Penggunaan kata anarkisme secara sembrono itu merekonstruksi pikiran masyarakat sehingga kata tersebut terus disalah artikan (H. P. Putra, 2013).

Penulis kelahiran Rusia yang juga anarkis, Alexander Berkman menegaskan, anarkisme bukan apa yang ada di pikiran kebanyakan orang hari ini ketika mendengar kata itu. Anarkisme bukan bom, ketidakteraturan, atau kekacauan. Anarkisme bukan perampokan dan pembunuhan. Anarkisme bukan berarti kembali ke barbarisme (Berkman, 2017).

Baginya, anarkisme kebalikan dari semua itu. Bahwa tidak seorang pun boleh memperbudak siapapun, merampok siapapun, atau memaksa siapapun. Anarkisme bagi Berkman adalah kondisi masyarakat dimana semua laki-laki dan perempuan bebas, dan semua menikmati kesetaraan dan manfaat dari hidup yang teratur dan masuk akal (Berkman, 2017).

Selain disamakan dengan kekacauan dan segala macam kata gantinya, anarkisme juga kerap disamakan dengan komunisme. Dua ideologi ini memang punya kesamaan sebagai ideologi politik kiri. Keduanya menentang kapitalisme, sistem yang dianggap sebagai penyebab ketidakadilan sosial dan eksploitasi. Komunisme, seperti yang dikemukakan Karl Marx dan Friedrich Engels, menganggap kapitalisme hanya menempatkan kelas pekerja (proletariat) dalam posisi tereksplorasi oleh pemilik modal, dalam bahasa Marx disebut borjuis. Baik anarkisme dan komunisme, sepakat bahwa kapitalisme menciptakan ketidaksetaraan antara kelas penguasa dan kelas pekerja.

Tidak hanya dalam segi pemikiran, sejarah anarkisme dan komunisme berkelindan. Tiga tokoh terkemuka dalam dua ideologi itu: Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, dan Karl Marx saling mengenal. Bakunin pemikir yang sangat menghormati Marx. Dia bahkan menerjemahkan Manifesto Komunis yang ditulis Marx ke bahasa Rusia. Namun sebagai anarkis, Bakunin menentang gagasan Marx soal kediktatoran proletariat (Guerin, 1970). Dia tak sepakat bahwa sosialisme, bahkan anarki bisa dicapai dengan kediktatoran proletariat. Menurut Bakunin, bagaimanapun sistem dan bentuk negara, siapapun penguasanya, pada dasarnya negara akan merusak

Apa yang ditawarkan Marx melalui gagasan kediktatoran proletarait, dinilai Bakunin hanya melahirkan penindas baru. Lebih parahnya, negara itu akan menyamar sebagai ekspresi dari kehendak rakyat. Pemerintahan negara yang terpusat, akan melestarikan kekuasaannya dan memperkuat proses dominasi. Itulah yang dikhawatirkan Bakunin. Kekhawatiran itu terjadi, ditandai saat kaum Bolshevik merebut kekuasaan pada 1917. Bolshevik yang disebut sebagai wujud pemerintahan proletar, malah menciptakan negara polisi yang birokratis dan besar (*Gagasan Dasar Pemikiran Bakunin*, 2020).

Bima Satria Putra dalam bukunya *Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan* mengatakan, sejarah kiri di Indonesia ditulis seakan menyamakan semua ideologi kiri (B. S. Putra, 2018). Karena itu pula, sejarah anarkisme disimplikasi. Di saat yang bersamaan, label negatif yang dilekatkan terhadap komunisme juga mengikuti anarkisme.

Sejak orde lama tumbang, dan Soeharto naik tahta, sekaligus dimulainya orde baru. Berbagai label ditempelkan pada komunisme dan yang dianggap partisipan. Mereka dianggap pemberontak, dianggap tidak beragama, hingga biang kerusuhan. Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dituding sebagai dalang Gerakan 30 September 1965, sejak saat itu dideklarasikan sebagai musuh negara (Taher, 2010). Mereka yang berstatus sebagai anggota PKI dan simpatisannya dibantai, diperkosa, dan dibunuh dengan sadis. Vincent Bevins, jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, menyebut tragedi itu sebagai Metode Jakarta. Sebuah metode penumpasan gerakan sayap kiri atau komunis yang didukung Amerika (Bevins, 2020).

Tragedi itu tidak sekadar kekerasan langsung. Ada kekerasan struktural dengan pembubaran PKI, lalu disusul keluarnya berbagai aturan pelarangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Berdampak pada anak cucu anggota PKI atau simpatisannya mengalami diskriminasi, hingga dilarang mengakses layanan publik. Semua rangkaian kekerasan itu, kemudian dilegitimasi secara budaya melalui film, buku, dan pemberitaan di media (Herlambang, 2013). Salah satu produk yang paling dianggap sukses yakni film *Pemberontakan G30S/PKI*. Film yang mengisahkan betapa biadabnya PKI dan simpatisannya, sehingga apa yang disebut sebagai bahaya laten komunis mengakar kuat. Siapapun yang dianggap komunis atau simpatisannya, dianggap sebagai musuh negara.

Menariknya, ideologi anti komunis ini terus laku bahkan setelah orde baru tumbang pada 1998. Itu menunjukkan kerja kebudayaan dengan ideologi anti komunis telah mengakar di Indonesia. Dalam politik elektoral, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, narasi anak komunis laku sebagai alat kampanye hitam untuk menyerang kandidat (Johari, 2019). Saat itu, Joko Widodo (Jokowi) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digambarkan sebagai anak komunis.

Meski sulit membayangkan Jokowi sebagai anak komunis jika melihat rekam jejaknya setelah dua periode menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Tapi tak bisa dinafikkan, serangan terhadap Jokowi saat itu menjadi

senjata utama lawannya. Terbukti, kelompok konservatif, terutama Islamis, yang dianggap beririsan dengan komunisme, karena dicitrakan anti agama, menjadi basis garapan suara lawannya, Prabowo Subianto (Mansyur, 2023). Di Pilpres 2019, Jokowi yang kembali berhadapan dengan Prabowo, kembali menerima serangan dengan narasi serupa, walau dengan eskalasi berbeda.

Beberapa waktu setelah pemungutan suara Pilpres 2019, yang digelar 17 April dan dimenangkan kembali oleh Jokowi. Pada 2 Mei 2019, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kala itu, Tito Karnavian mengumumkan musuh ideologis baru negara, yakni anarko (Tivany Wargadiredja, 2019). Itu disampaikan Tito dalam jumpa pers terkait peringatan Hari Buruh atau May Day yang berlangsung 1 Mei. Tito menuding kelompok anarko-sindikalis bertanggung jawab dalam kerusuhan di sejumlah aksi May Day di sejumlah kota, seperti Yogyakarta, Bandung, dan Makassar. Tito dalam kesempatan tersebut juga mengaku telah memerintahkan pemetaan terhadap kelompok anarko.

Sehari setelahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan pihaknya telah menggandeng Badan Intelijen Negera (BIN) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk pemetaan dimaksud (Santoso, 2019). Sejak saat itu, gerakan anarkisme dipahami publik sebagai massa berbaju hitam dengan simbol "A" yang getol memicu kerusuhan (Anjani, 2020). Sejak saat itu pula, anarkisme diidentifikasi sebagai ideologi kiri yang berkembang di Indonesia.

Meski baru diidentifikasi dan diumumkan ke publik pada 2019, gerakan anarkisme di Indonesia sebenarnya bukan barang baru. Bima Satria Putra, mencatat gerakan anarkisme ada bahkan sebelum kemerdekaan. Bima dengan berani menyebut Multatuli atau Ernest Douwes Dekker sebagai seorang anarkis (B. S. Putra, 2018), penulis novel Max Havelaar yang disebut Pramoedya Ananta Toer sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Di dalam bukunya *Di Bawah Bedera Hitam* (Prawirodirdjo et al., 2019), Bima bahkan menuliskan ada anarkis yang jadi pahlawan nasional, ia adalah Alimin Prawirodirdjo.

Namun yang berbeda dari anarkisme setelah Tito mengumumkan musuh ideologis baru di 2019, narasi anarko biang kerusuhan mejadi laku. Beberapa bulan setelahnya, di tahun yang sama polisi juga menyebut kelompok anarko menjadi dalang kerusuhan demonstrasi penolakan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Astuti, 2019).

Pola itu terus digunakan polisi. Misalnya di 2020, demo Omnibus Law di berbagai daerah dibubarkan, ratusan orang juga sempat ditahan (Firmansyah, 2020), May Day 2021 juga (Sjofjan Rassat, 2021), lalu demo 11 April 2022 (Rachman, 2022), kemudian Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Makassar pada 2023 (Sak, 2023), demonstrasi Peringatan Darurat di berbagai kota pada 2024 (Ilham, 2024), hingga demonstrasi Indonesia Gelap (Alim, 2025). Di beberapa peristiwa itu, polanya sama, aparat keamanan membubarkan demonstrasi dengan dalih massa telah disusupi anarko, polisi

menangkap demonstran yang diklaim anarko, lalu diikuti pemberitaan media massa mengamplifikasi tudingan itu.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana media berperan menjadi alat represif negara. Seperti yang dikatakan Louise Althusser (Althusser, 2015), media lekat dengan kekuasaan, terutama sebagai sarana legitimasi kekuasaan untuk menciptakan rasa patuh terhadap kelompok penguasa melalui doktrinasi ideologi.

Penulis menilai sejumlah media yang memberitakan anarko melakukan kekerasan budaya, sebagaimana konsep kekerasan menurut sosiolog asal Norwegia, Johan Galtung (Galtung, 1990). Seperti berita berjudul “Kapolrestabes Tudung Demo Berujung Ricuh di Makassar Dipicu Anarko” yang diterbitkan CNN saat Peringatan Darurat, merupakan salah satu contohnya (Ilham, 2024).

Hal serupa, dilakukan media, baik yang berbasis di Makassar atau di Jakarta. Media yang berbasis di Jakarta seperti CNN Indonesia dan Kompas. Kemudian media yang berbasis di Makassar seperti Detik Sulsel, Herald Sulsel, Detik Sulsel, IDN Times Sulsel, dan Fajar Online. Penelitian ini, tidak hanya melihat tudingan dan labeling yang dilakukan media sebagai penghakiman, atau yang dikenal dengan penghakiman sepihak media (*trial by press*) (Suhendar, 2025). Lebih dalam dari itu, akan melihatnya sebagai sebuah kekerasan.

Merujuk Galtung, pemberitaan tersebut masuk dalam kekerasan budaya. Berbeda dengan kekerasan langsung dan kekerasan struktural, kekerasan budaya atau kultural merujuk pada aspek kebudayaan, seperti agama, ideologi, bahasa, dan seni (Galtung, 1990). Hal-hal tersebut menurut Galtung bisa melegitimasi kekerasan, yang pada akhirnya menjadi bagian kekerasan itu sendiri. Jika itu terus berlanjut, fenomena ini mirip dengan hantu komunis yang sengaja diciptakan negara, dan dikambing hitamkan atas nama stabilitas di masa orde baru (Galtung, 1990). Hantu itu kini bergeser menjadi hantu hitam. Atau menambah hantu baru selain komunisme: anarkisme.

Penelitian ini akan fokus pada pemberitaan demonstrasi Peringatan Darurat di Makassar. Gerakan ini disebut *Tempo* sebagai gerakan pemutus mala (Robet, 2024). Pasalnya, demonstrasi yang dilakukan pada Agustus 2024 itu dinilai sebagai satu-satunya gerakan di sepuluh tahun masa pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi yang sukses mendesak tuntutan bulat-bulat.

Saat itu, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil menanggapi digodoknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tapi di sisi lain, yang jarang disorot adalah, demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah hari itu diwarnai represifitas aparat.

Di Makassar misalnya, demonstrasi yang digelar 26 Agustus 2024 dibubarkan paksa, beberapa demonstran dipukuli, dan tak sedikit yang ditangkap. Polisi bersama warga yang diduga bayaran, bahkan merengsek masuk ke kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Bosowa (Unibos), dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) untuk memukuli dan menangkap demonstran.

Di Jalan Urip Sumoharjo, sebuah angkot terbakar, pengemudinya bersaksi bahwa penyebabnya karena gas air mata yang ditembakkan polisi meledak di dalam angkot (Aidil, 2024). Namun polisi membantahnya, mereka menyebut angkot itu dibakar oleh kelompok anarko. Kepada media, polisi juga menyebut tindakan mereka membubarkan demonstrasi karena massa telah disusupi kelompok anarko. Media mengutip pernyataan itu, dan membingkainya secara tendensius bahwa kelompok anarko bertanggung jawab atas kerusuhan.

Penelitian soal anarkisme sebenarnya masih tiris di Indonesia. Apalagi dalam konteks studi media atau komunikasi. Penelitian terdahulu, alih-alih melihat anarko sebagai objek kekerasan, bahkan sejumlah penelitian melanggengkan label perusuh, chaos, dan berbagai macam kata gantinya terhadap kelompok anarko dalam menggunakan kata anarkisme itu sendiri. Seperti penelitian Hasse J. yang terbit di jurnal Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel berjudul “Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar” malah mengukuhkan labeling tak berdasar tersebut terhadap anarko.

Meski begitu, bukan berarti penelitian komunikasi tentang anarko tidak ada. Sebelumnya telah ada penelitian yang melihat bagaimana representasi anarko di media kerap disalah pahami, seperti yang ditulis (Pahalmas, 2016) dengan judul “Makna Anarkisme di Media Pemberitaan Online” dan (Aden Suryana, 2022) dengan judul “Representasi Kelompok Anarko di Media: Bias Media Atas Pemberitaan Kalangan Anarko dan Paham Anarkisme.” Kemudian penelitian yang lebih menukik, ditulis (Puspito Putra, 2013) dengan judul “Pemahaman Wartawan Media Cetak Makassar Terhadap Penggunaan Istilah Anarkisme Dalam Berita Demonstrasi Mahasiswa Makassar.” Walau terbilang lawas dari dua penelitian sebelumnya, skripsi Puspito ini lebih spesifik mencari alasan mengapa penggunaan istilah anarkisme di media secara serampangan terjadi.

Ada juga penelitian yang ditulis (Herlambang, 2013) berjudul “Kekerasan Budaya Pasca 1965.” Walaupun hanya spesifik membahas kekerasan budaya terhadap komunisme setelah orde lama lengser, namun menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Karena menggunakan teori kekerasan budaya menurut Johan Galtung yang melihat media sebagai alat legitimasi kekerasan.

Penelitian kekerasan budaya terhadap anarko sendiri, pada dasarnya belum pernah dilakukan. Karena itu, penting untuk melihat wacana apa yang terbangun dalam pemberitaan terhadap anarko belakangan ini. Karenanya penelitian ini akan menggunakan analisis wacana kritis model eksklusi dan inklusi Theo Van Leeuwen (Eriyanto, 2001). Model analisis ini akan menunjukkan bagaimana anarko direpresentasikan menggunakan tiga strategi ekeklusi, dan tujuh strategi inklusi (Van Leeuwen, 2013). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian berjudul “Kekerasan Media Pada Anarko (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Demonstrasi Peringatan Darurat di Makassar).”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana media melakukan kekerasan terhadap anarko dalam pemberitaan demonstrasi Peringatan Darurat di Makassar?
2. Mengapa media terus menggunakan kata anarkisme secara keliru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diinginkan dan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat bagaimana media melakukan kekerasan terhadap anarko dan menjadi aparatus ideologi negara.
2. Untuk menganalisis dan mengonstruksi anarkisme yang kerap disalah pahami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat pada aspek teoritis dan praktis. Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi acuan ilmiah dalam studi media, politik, dan gerakan sosial. Terkhusus bagaimana peran media dijadikan sebagai alat represif kekuasaan dan meyisihkan kelompok yang dianggap mengganggu status quo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan media-media dalam pemberitaannya agar tak terjadi bias. Sehingga media yang mestinya loyal pada publik benar-benar terwujud, alih-alih loyal pada kekuasaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Jurnalisme

Sejumlah sumber menyebut praktik jurnalisme dimulai dari papan pengumuman di Romawi kuno, bernama *Acta Djurna*, yang memuat berita pemerintahan dan peristiwa penting. Namun menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dua wartawan veteran dan pegiat studi media, jurnalisme modern muncul pada abad ke-17 (Kovach & Rosenstiel, 2006). Surat kabar cetak pertama mulai muncul di Eropa, seperti *Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien* yang diterbitkan di Jerman pada 1605. Sejarah jurnalisme sangat dipengaruhi teknologi percetakan yang ditemukan Johannes Gutenberg.

Pada abad ke-19 dan ke-20, jurnalisme mengalami perubahan besar dengan munculnya surat kabar harian, kantor berita, dan teknologi komunikasi seperti telegraf, radio, dan televisi. Konsep jurnalisme modern menekankan objektivitas, kecepatan, dan investigasi yang mendalam. Memasuki era digital di abad ke-21, jurnalisme berkembang melalui internet dan media sosial, yang memungkinkan penyebaran berita secara instan.

Goenawan Muhammad, pendiri *Tempo* di pengantarnya dalam (Kovach & Rosenstiel, 2006) menyebut jurnalisme tidak bermula dan berakhir dengan berita. Ia mendefinisikannya dengan analogi bahwa sikap ingin tahu adalah dasarnya, seperti sebuah pondasi. Lalu jurnalisme menempuhnya dalam keadaan ruwet dan licin, yang membutuhkan bukan saja kecerdikan tapi kesediaan menjadi polisi lalu lintas, dan kemudian jadi jaksa dan hakim terhadap diri sendiri. Bahkan setelah berita ditulis, menurut Goenawan status terdakwa belum selesai. Banyak yang mendefinisikan jurnalisme, namun tak sedikit kalangan yang menganggap pendefinisian itu tak perlu. Pada intinya, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel "Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri" (Kovach & Rosenstiel, 2006).

Tantangan jurnalisme memasuki babak baru ditandai berkembang pesatnya teknologi dan informasi. Bagaimana seharusnya jurnalis bersikap, apa yang harusnya diketahui wartawan dan diharapkan publik, menjadi pertanyaan besar di era ini. Berangkat dari itu, Kovach dan Tom, mencetuskan pemikirannya soal elemen jurnalisme. Dibuat dengan melibatkan 1.200 jurnalis. Karya itu menjadi rujukan jurnalis di berbagai belahan dunia dalam melakukan kerja jurnalistiknya. Berikut ini penjelasan elemen jurnalisme menurut Kovach dan Tom dalam (Harsono, 2001):

a. **Kewajiban Pertama Jurnalisme adalah Kebenaran**

Jurnalisme harus selalu berlandaskan pada kebenaran. Kebenaran dalam jurnalisme bukan sekadar mengumpulkan fakta, tetapi juga

memahami konteksnya secara lebih luas. Berita yang baik tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Bagi jurnalis, mencari kebenaran berarti melakukan verifikasi yang ketat terhadap sumber informasi. Mereka harus menghindari berita palsu, propaganda, atau informasi yang menyesatkan. Kebenaran dalam jurnalisme bertujuan untuk memberi pemahaman kepada publik.

b. Loyalitas Utama Jurnalisme kepada Warga

Jurnalisme bukan alat propaganda pemerintah atau kepentingan korporasi, melainkan bertanggung jawab kepada masyarakat. Artinya, seorang jurnalis harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini berarti jurnalis harus menjaga independensi dalam pemberitaan, tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau ekonomi yang dapat mengganggu objektivitas berita. Media yang bertanggung jawab adalah media yang memberikan informasi demi kepentingan warga, bukan demi kepentingan pemilik modal atau elit politik.

c. Esensi Jurnalisme adalah Disiplin Verifikasi

Jurnalis tidak boleh hanya mengandalkan satu sumber informasi. Mereka harus melakukan pengecekan silang, menelusuri bukti, dan mengonfirmasi fakta sebelum menyiarkan berita. Prinsip verifikasi ini membedakan jurnalisme dari opini, propaganda, atau sekadar desas-desus. Disiplin verifikasi membantu menjaga kredibilitas media dan membangun kepercayaan masyarakat. Di era digital saat ini, di mana informasi menyebar begitu cepat, disiplin verifikasi menjadi semakin penting untuk membedakan berita yang sah dari hoaks.

d. Jurnalis Harus Tetap Independen

Jurnalisme yang baik adalah jurnalisme yang bebas dari tekanan politik, ekonomi, dan kepentingan lainnya. Seorang jurnalis harus menjaga jarak dari sumber berita agar dapat tetap objektif dan tidak berpihak. Independensi ini juga berarti jurnalis tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang mereka liput. Jika seorang jurnalis memiliki hubungan dekat dengan politisi atau pengusaha yang sedang diberitakan, maka independensi jurnalismenya bisa dipertanyakan.

e. Jurnalisme Harus Menjadi Pemantau Kekuasaan

Salah satu tugas utama jurnalisme adalah mengawasi kekuasaan. Media berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa pemerintah, institusi, dan individu yang berkuasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pada praktiknya, jurnalisme investigasi menjadi alat penting untuk mengungkap korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa fungsi kontrol ini, kekuasaan bisa bertindak sewenang-wenang tanpa ada yang menegur atau mengkritisi.

f. Jurnalisme Harus Memberikan Forum bagi Kritik dan Kompromi Publik

Jurnalisme tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya.

Media harus menjadi wadah dialog publik yang sehat, di mana berbagai perspektif bisa didengar. Namun, forum ini harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi ajang penyebaran kebencian atau disinformasi. Oleh karena itu, jurnalis harus memastikan bahwa perdebatan yang muncul di media tetap berbasis pada fakta dan analisis yang kredibel.

g. **Jurnalisme Harus Membuat Hal yang Signifikan Menarik dan Relevan**

Berita yang penting tidak selalu menarik bagi khalayak. Oleh karena itu, jurnalis harus mampu menyampaikan informasi yang signifikan dengan cara yang menarik, tanpa mengorbankan substansi atau kebenaran. Teknik storytelling dalam jurnalisme dapat digunakan untuk menyajikan berita dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan begitu, masyarakat tetap mendapatkan informasi yang penting tanpa merasa bosan atau kewalahan dengan bahasa yang terlalu teknis.

h. **Jurnalisme Harus Komprehensif dan Proporsional**

Berita yang baik harus menyajikan gambaran yang utuh tentang suatu peristiwa. Jurnalis tidak boleh hanya mengambil satu sisi cerita dan mengabaikan perspektif lain. Selain itu, berita juga harus proporsional, artinya tidak membesar-besarkan isu yang sepele dan tidak mengecilkan isu yang sebenarnya penting. Sensasionalisme dalam pemberitaan hanya akan merusak kredibilitas media dan menyesatkan publik.

i. **Jurnalis Harus Mengikuti Nurani**

Jurnalis dalam menjalankan tugasnya sering kali dihadapkan pada dilema etika. Mereka harus mampu mempertahankan integritas dan moralitasnya dalam setiap keputusan yang diambil. Jika suatu berita berpotensi merugikan pihak tertentu atau menimbulkan dampak sosial yang besar, jurnalis harus mempertimbangkan dampaknya dengan hati-hati. Jurnalis yang baik tidak hanya berpegang pada aturan teknis, tetapi juga pada prinsip moral yang tinggi.

j. **Warga Juga Memiliki Hak dan Tanggung Jawab dalam Jurnalisme**

Elemen kesepuluh ini tidak dijelaskan Andreas dalam tulisannya yang dibuat di 2001. Mengingat elemen tersebut baru ditambahkan pada 2007. Elemen terakhir itu dianggap penting di era digital saat ini karena setiap individu bisa menjadi penyebar informasi. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memilah informasi yang benar dan tidak menyebarkan berita palsu. Jurnalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab jurnalis dan media, tetapi juga warga sebagai konsumen berita. Dengan meningkatkan literasi media, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi berita dan membantu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat.

2. Berita

Secara komprehensif, Mitchell V. Charnley mendefinisikan berita sebagai laporan yang cepat mengenai fakta atau opini yang menarik atau penting, atau keduanya, bagi sejumlah besar orang (Charnley, 1975). Definisi

ini banyak dikutip karena dianggap lengkap, selain itu, dalam bukunya berjudul *Reporting Charnley* juga banyak mengulas jurnalisme dan berita secara lengkap. Meski begitu definisi berita banyak diungkapkan sejumlah ahli.

Menurut John Fiske dalam (Fiske, 2016), berita bukan sekadar media untuk menyampaikan pesan, namun juga alat konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi, struktur media, dan kepentingan ekonomi. Fiske menekankan bahwa berita adalah hasil dari proses seleksi dan penyajian yang dilakukan oleh media, yang mana setiap tahapannya melibatkan keputusan-keputusan tertentu yang dapat membentuk makna bagi audiens. Dalam arti lain, berita tidak bersifat netral atau objektif sepenuhnya, melainkan mengandung unsur interpretasi dan pemaknaan yang bergantung pada konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.

Menurut Fiske, berita juga memiliki dimensi semiotik yang kuat, di mana tanda-tanda dan simbol yang digunakan dalam pemberitaan berperan dalam membentuk persepsi publik. Penentuan struktur berita, penggunaan bahasa, gambar, dan elemen lain dalam pemberitaan dianggap dapat mengarahkan audiens pada interpretasi yang spesifik. Oleh karena itu, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik melalui penyajian berita yang disesuaikan dengan kepentingan ideologis atau ekonomi tertentu.

Menariknya, ia menganggap audiens tidak pasif dalam memahami berita. Ia berpendapat (Fiske, 2016) bahwa khalayak turut serta dalam membentuk makna berdasarkan pengalaman dan latar belakang mereka sendiri. Karenanya, berita menjadi arena interaksi antara media dan audiens, di mana makna tidak hanya dikendalikan oleh institusi media, tetapi juga dipengaruhi oleh cara masyarakat menafsirkan dan merespons informasi yang mereka terima. Perspektif ini menunjukkan bahwa berita bukan sekadar fakta objektif, melainkan suatu konstruksi komunikasi yang dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks sosialnya.

Sementara itu, Denis McQuail (McQuail, 1996) melihat berita sebagai bagian dari sistem komunikasi yang lebih luas, di mana isi dan penyebarannya dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, dan teknologi.

Menurut McQuail, berita dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan redaksi, nilai berita, dan format penyajian, sementara faktor eksternal mencakup tekanan politik, ekonomi, serta budaya masyarakat. Media massa, bagi McQuail memiliki kekuatan untuk membentuk agenda publik dan opini masyarakat melalui seleksi isu yang diberitakan. Hal itu menunjukkan bahwa berita tidak selalu objektif, melainkan memiliki unsur subjektivitas yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan (McQuail, 1996).

Kedua pemikir ini: McQuail dan Fiske menunjukkan bahwa berita bukan sekadar produk informasi, tetapi juga bagian dari konstruksi sosial yang dapat membentuk opini dan pandangan masyarakat. Fiske menggarisbawahi aspek semiotik dalam produksi berita, sedangkan McQuail menyoroti peran media dalam struktur sosial,

Sementara itu, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, eks jurnalis terkemuka

di Amerika Serikat dan pegiat studi media, dalam bukunya *Elemen Jurnalisme* yang diterbitkan dan diterjemahkan Yayasan Pantau, menekankan berita harus memenuhi standar etika Jurnalistik. Yaitu mencari kebenaran, loyal kepada warga, dan bersikap independen dari kepentingan tertentu. Mereka juga menekankan prinsip verifikasi sebagai elemen utama dalam berita yang kredibel. Dalam konteks ini, jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menyaring informasi secara akurat dan memastikan bahwa berita yang disampaikan tidak bias atau dipengaruhi oleh propaganda (Kovach & Rosenstiel, 2006).

3. Anarkisme

Istilah anarkisme berawal dari karya Joseph Proudhon yang berjudul *What is Property*. Ia berpendapat bahwa properti atau kepemilikan pribadi adalah curian (Proudhon, 1876). Hal itulah yang menjadi buih dalam pemikiran anarkisme. Anarkisme, dalam hal ini adalah ajaran revolusioner serta ideologi ekstrem kiri (Goldman, 2024).

Secara etimologi, anarkisme dari bahasa Yunani, *anarchos* atau *anarchia*, yang berarti tanpa pemerintahan. Singkatnya, anarkisme merupakan filsafat politik yang menghendaki kehidupan tanpa hierarki (Saputra, 2023). Hierarki di sini terutama adalah negara. Karena itu, anarkisme pada prinsipnya menentang negara dan kapitalisme. Jika anarkisme adalah paham politik yang menentang hierarki, maka anarkis atau anarko merupakan penganut anarkisme. Sedangkan anarki cita-cita anarkisme itu sendiri, sebuah kehidupan sosial tanpa hierarki. Hierarki dalam artian ini, terutama adalah negara.

Filsuf dan anarkis asal Rusia, Mikhail Bakunin menganggap negara bersifat destruktif. Semulia apapun tujuannya dibentuk, negara akan merusak semua yang disentuhnya. Menurutnya, negara dengan segala kekuasaannya hanya merampas kebebasan individu. Negara dianggap hanya melayani kepentingan segelintir orang, di saat bersamaan menjadi alat kelas penguasa mempertahankan dominasi mereka (*Gagasan Dasar Pemikiran Bakunin*, 2020).

Itulah kenapa anarkisme menentang pemikiran Karl Marx soal kediktatoran proletariat. Bahwa untuk mencapai tujuan sosialisme mesti dengan negara yang dikontrol pemerintah proletariat. Walau dalam sejumlah rujukan, ada marxis yang anti negara, itulah yang dikenal dengan marxisme libertarian. Gagasan yang menolak kapitalisme sekligus negara (Newman, 2009).

Filsuf abad 20, Max Stirner dan tokoh postmodernisme, Gilles Deleuz dalam (Newman, 2009) memandang negara sebagai institusi yang menindas. Dua pemikir anti negara itu menolak teori-teori kontrak sosial sebagai pondasi awal pembentukan negara. Menurut Stirner, gagasan negara perlu dipertanyakan ulang. Menurutnya negara tidak bisa direformasi, karena pada dasarnya tidak bisa dipercaya. Negara baginya punya logika sendiri yang kejam. Pemikiran sama yang telah diungkapkan Kropoktin dan Bakunin bahwa negara memiliki logika penindasan untuk selalu merawat diri.

Sejarah menunjukkan banyaknya contoh seperti klaim para anarkis. Seperti yang terjadi di China, Kuba, serta sejumlah negara yang mengaku sosialis. Itu pula mengapa penganut paham liberal dan anarkisme kerap mengolok revolusi kediktatoran proletariat dengan kisah babi di sebuah peternakan, seperti yang ditulis George Orwell dalam novel alegori politiknya, *Animal Farm*.

Di novel yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, Orwell menggambarkan Peternakan Manor sebagai sebuah negara (Orwell, 2019). Mulanya, para binatang merasa dieksploitasi oleh Pak Jones, pemilik Peternakan Manor. Mereka pun berencana melakukan pemberontakan. Sampai suatu masa, pemberontakan itu benar-benar terjadi di bawah pimpinan dua babi cerdas: Snowball dan Napoleon. Mereka berhasil mengusir Pak Jones dan semua manusia dari peternakan, namun untuk menghindari dualisme kepemimpinan, Napoleon menyingkirkan Snowball dengan cara kejam. Akhirnya, Snowball memimpin peternakan dengan gaya otoriter. Sejumlah prinsip dan aturan yang mulanya menjadi dasar untuk mengusir manusia, perlahan mulai dikangkangi.

Misalnya, satu dari tujuh aturan yang telah disepakati dengan para binatang, bahwa apapun yang berjalan dengan kaki dua adalah musuh. Tapi Napoleon malah bekerjasama dengan manusia. Alasannya, Napoleon yakin binatang lain tak secerdas dirinya dan para babi, sehingga bisa memanfaatkan binatang lain untuk kepentingan dirinya dan para babi. Untuk mempertahankan kekuasaan, ia dikawal ketat oleh anjing-anjing yang dipeliharanya. Ada pula Squealer, babi yang digambarkan sebagai sosok brilian dengan kemampuan retorika yang memukau. Ia dimanfaatkan sebagai propagandis, gunanya untuk menjaga stabilitas politik ketika para binatang hendak menggulingkan kekuasaan Napoleon.

Cerita Orwell dalam *Animal Farm*, dianggap sebagai metafora sekaligus kritik terhadap totalitarisme di Uni Soviet (H Nadia, 2022). Joseph Stalin yang berkuasa saat itu, ternyata melanggengkan penindasan terhadap rakyat Uni Soviet atas nama kediktatoran proletariat. Di dalam konsep Louise Althusser, para anjing yang digunakan Napoleon mempertahankan kekuasaannya adalah aparatus represif negara. Sementara Squealer merupakan aparatus ideologi negara (Althusser, 2015). Dua instrumen itu yang digunakan negara untuk melestarikan kekuasaannya.

Di Indonesia sendiri, Bima Satria Putra dalam *Proyek Suku Api* menelusuri sejarah masyarakat tanpa negara di nusantara. Di seri pertama, Bima menulis masyarakat tanpa negara di Kalimantan, dengan buku berjudul *Dayak Mahardeka*. Di bagian awal, Bima menegaskan masyarakat tanpa negara bukan berarti primitif, mereka memilih jadi anarkis bukan karena tidak mampu membentuk negara dan menunjuk salah satu di antara mereka jadi raja.

“Mereka tahu apa itu negara dari pengalaman dipajaki, diperbudak, wajib militer, dst. Mereka tanpa negara juga bukan karena terlalu jauh

dari pusat kekuasaan, tetapi karena mereka memang menjauhinya”
(B. S. Putra, 2021).

Di seri keduanya, Bima menelusuri masyarakat tanpa negara di kepulauan Maluku, judul bukunya Anarki di Alifuru. Bima mengulangi argumennya seperti di Dayak Mahardeka, bahwa masyarakat tanpa negara di Maluku juga tidak bodoh untuk membuat negara. Dia menekankan, anarkisme terlalu sempit untuk disebut paham dari barat. Menurutnya, anarkisme tidak sekadar teori dari tokohnya di barat seperti dikatakan Kapolri Tito Karnavian, namun juga termasuk praktiknya seperti yang ada di nusantara. “Coba tilik Nunusaku (Maluku), di sana ada anarki dan Mikhail Bakunin pasti setuju” (B. S. Putra, 2024).

Gerakan anarkisme di masa kontemporer, sebenarnya sudah ada di Indonesia sebelum May Day 2019. Bima menyebutnya sebagai generasi kedua (B. S. Putra, 2018) setelah Multatuli dan Alimin. Generasi ini dimulai setelah orde baru memasuki masa senja melalui subkultur punk dan skinhead. Pada 2007, para anarkis dari berbagai kota di Indonesia: kolektif Afinitas Yogyakarta, Apokalips Bangung, Jaringan Otonomis Jakarta, Jaringan Autonomous Salatiga, Kontinum Makassar, dan beberapa lainnya.

Mereka melakukan konsolidasi nasional dalam sebuah wadah yang disebut Jaringan Anti Otoritarian (JAO). JAO inilah yang pertama kali mengibarkan bendera hitam dalam sebuah aksi tunggal dengan melibatkan ratusan orang pada 2008. Setelahnya, aksi dari kelompok anarkis di Indonesia terus eksis, baik melalui aksi langsung dengan membakar pos polisi, merusak ATM, terlibat dalam pengorganisasian warga yang mempertahankan tanahnya, pasar gratis, hingga propaganda melalui media dan karya seni.

Bima meguraikan ada tiga alasan mengapa anarkisme di Indonesia bisa bangkit kembali. Pertama, anarkisme dianggap sebagai kritik konsumerisme yang trendi bagi mereka yang merasa terasing oleh kehidupan kota. Kedua, bagi mereka yang politis, anarkisme dianggap menawarkan kerangka kerja untuk mengkritik struktur negara dan sosial yang menindas. Terakhir, karena marxis yang mengubah pandangan ke anarkisme karena alasan taktis. Setelah aturan pelarangan komunisme, marxisme, leninisme setelah peristiwa 1965. Mereka beranggapan perjuangan akar rumput, dan persatuan kiri lebih penting. Selain itu karena para marxis melakukan hal tersebut karena kegaagalan gerakan nearaa komunis otoritarian internasional (B. S. Putra, 2018).

Pada praktiknya, tak bisa dinafikkan anarkisme lekat dengan aksi langsung, tapi itu bukan satu-satunya metode. Lagipula, aksi langsung juga bukan metode yang dimonopoli kelompok anarko. Siapapun dengan latar belakang apapun bisa menggunakannya, tanpa menggunakan pakaian serba hitam terlebih dahulu, atau kepalanya berisi berbagai pemikiran anarkisme. Di dalam tubuh anarkisme sendiri, aksi langsung sebagai bagian dari insurreksi

masih terdapat selisih paham. Perdebatan anarkisme insureksioner dan anarkisme pasifis masih tak berujung.

Para pasifis ini ada yang tanpa kompromi menolak kekerasan apapun bentuknya, ada juga yang jarang menggunakan kekerasan, namun tak segan-segan menggunakannya. Karena itu, di banyak tempat, meski para insureksioner jumlahnya sedikit, di momen tertentu bisa berkali-kali lipat. Terutama dalam krisis ekonomi-politik (B. S. Putra, 2018). Selain ada yang menerima kekerasan dan tidak. Perbedaan mendasar kedua aliran ini tercermin dari penolakan terhadap organisasi formal. Insureksioner cenderung terdiri dari kelompok kecil dan fleksibel, menolak organisasi seperti federasi dan serikat. Perdebatan soal organisasi dalam tubuh anarkisme ini lebih kompleks dibahas dalam anarkisme sosial Vs anarkisme individu.

Tokoh utama dalam anarkisme pasifis ialah Leo Tolstoy. Novelis dan filsuf asal Rusia yang dikenal sebagai Kristen yang taat itu percaya bahwa negara pada dasarnya instrumen kekerasan yang bertentangan dengan ajaran agama apapun. Tolstoy dalam esainya *On Anarchy* menyebut kaum anarkis benar dalam menolak tatanan yang ada (negara dan kapitalisme). Ia menegaskan bahwa tidak ada otoritas yang lebih buruk daripada yang dilakukan oleh otoritas saat ini. Tapi menurutnya, anarki tidak bisa tercapai dengan menggunakan kekerasan, melainkan hanya ketika semakin banyak orang yang tidak memerlukan perlindungan dari pemerintah (Tolstoy, 1900). Ia mengajukan pembangkangan sipil.

Mulanya pasifisme dan anarkisme tidak berjalan beriringan hingga abad ke-20. Setelah dua perang dunia meletus, dan bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 (Ostergaard, 1982). Tokoh yang paling penting membantu membentuk anarko-pasifisme adalah Mahatma Gandhi, yang banyak dipengaruhi oleh Tolstoy. Pemikiran Tolstoy bahwa perubahan sosial sejati harus dimulai dari kesadaran moral individu dan diimplementasikan melalui ketidakpatuhan sipil sangat memengaruhi Gandhi. Itu bisa dilihat dari surat menyurat Gandhi dan Tolstoy yang telah dibukukan berjudul "*Letters from One Correspondence*" atau sering disebut "*The Gandhi -Tolstoy Letters*". Korespondensi itu berlangsung antara tahun 1909 hingga 1910 (Gandhi & Tolstoy, 1987).

Walau Gandhi banyak dipengaruhi Tolstoy yang anarkis, banyak yang meragukan Gandhi sebagai seorang anarkis. Mengingat sepak terjangnya dalam kemerdekaan India. Tapi sebenarnya Gandhi telah mendefinisikan ulang nasionalisme untuk menuju cita-cita anarki. Caranya dengan membubarkan Partai Kongres setelah kemerdekaan, meski pada akhirnya gagal (Fattal, 2006). Gandhi dalam (Fattal, 2006) disebut sebagai anarkis secara filosofis karena ia percaya bahwa "Kebaikan terbesar dari semua hanya dapat diwujudkan dalam demokrasi kelas dan tanpa negara."

Gandhi tak melanjutkan negara yang tersentralisir dan demokrasi parlemen. Menurutnya, demokrasi barat telah memicu kekerasan. Karenanya ia mengusulkan desentralisasi. Gagasannya adalah swaraj (Fattal, 2006).

Pemerintahan yang tidak hanya bebas dari kekuasaan asing, tetapi juga terbebas dari penindasan internal, seperti ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan korupsi moral. Ia menekankan bahwa swaraj sejati hanya dapat dicapai melalui satyagraha (pembangkangan sipil), ahimsa (tanpa kekerasan), dan kemandirian ekonomi (swadeshi) (Gandhi & Gandhi, 1939).

Dalam praktiknya, konsep swaraj juga menginspirasi gerakan desentralisasi pemerintahan, seperti sistem panchayat raj (pemerintahan desa), yang menekankan pemerintahan lokal yang berbasis partisipasi rakyat. Gandhi percaya bahwa masyarakat harus mengembangkan otonomi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari pertanian hingga pendidikan, tanpa ketergantungan pada otoritas pusat atau kekuatan colonial (Gandhi & Gandhi, 1939).

Pasifis dalam pemikiran Gandhi, bukan berarti benar-benar tanpa kekerasan. Saat perjalanan gerakan India untuk pembebasan nasional, senjata juga digunakan untuk melawan struktur yang menindas. Hal sama yang dilakukan para anarkis saat perang saudara di Spanyol (Fattal, 2006). Konsep perlawanan tanpa Kekerasan atau ahimsa Gandhi, disebut kekuatan paling ampuh yang tersedia bagi umat manusia. Kekerasan dapat dibenarkan, bahkan adakalanya wajib digunakan. Intinya, ahimsa bukan menghindari perkelahian melawan kejahatan (Gandhi, 1988).

Perbedaan ahimsa dan pengecut, kata Gandhi sangat tipis. Ia mengisahkan sekelompok penduduk suatu dusun yang memberitahunya ada pasukan polisi menggedor rumah mereka, lalu menganiaya para perempuan. Penduduk itu tidak melawan karena sebelumnya diberitahu Gandhi mengenai sikap pantang kekerasan. Mendengar itu Gandhi tertunduk dan malu. Menurutny, adalah sikap jantan membela harta benda, kehormatan, atau agama dengan pedang. Tapi lebih jantan dan mulia lagi jika membela segala itu tanpa menyakiti penyerang.

“Jika harus memilih antara tindakan Kekerasan dan lari sebagai pengecut, saya lebih suka Kekerasan daripada pengecutan. Saya tidak mampu menganjurkan sikap pantang kekerasan kepada seorang pengecut, seperti halnya saya tidak mampu mengajak orang buta menikmati pengalaman alam yang indah permai. Sikap pantang kekerasan sesungguhnya adalah puncak keberanian,” (Gandhi, 1988).

4. Demonstrasi Peringatan Darurat

Demonstrasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring, 2016) bentuk protes yang dilakukan secara massal. Padanannya adalah unjuk rasa. Jika menilik Sejarah, demonstrasi di dunia lekat dengan protes terhadap kekuasaan. Misalnya dalam peristiwa Haymarket. Demonstrasi yang terjadi pada 4 Mei 1886 di Chicago itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah gerakan buruh Amerika Serikat bahkan dunia (Avrich, 2020). Bagaimana tidak, aksi ini dianggap sebagai tonggak delapan jam kerja yang hingga hari ini masih berlaku.

Dikenal dengan peristiwa Haymarket karena demonstrasi itu digelar di Haymarket Square. Demonstrasi bermula dari para pekerja yang meminta jam kerja dipangkas menjadi delapan jam kerja sehari. Pada malam itu, para pekerja berkumpul menyuarakan aspirasi mereka, hingga sebuah bom dilemparkan ke arah barisan polisi yang berusaha membubarkan massa. Akibatnya menewaskan tujuh orang dan banyak luka-luka.

Insiden tersebut memicu gelombang histeria massal dan mengarah pada penangkapan delapan tokoh anarkis yang dianggap bertanggung jawab, meskipun bukti keterlibatan mereka lemah. Pengadilan yang diadakan kemudian dianggap tidak adil, namun empat dari terdakwa tetap dieksekusi. Peristiwa ini menjadi latar belakang penetapan Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Haymarket menjadi simbol perjuangan untuk hak-hak pekerja dan keadilan sosial di seluruh dunia.

Ada banyak contoh keberhasilan demonstrasi menggolkan tuntutan sebagaimana tujuannya digelar. Sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi, demonstrasi pada dasarnya bukan metode yang semata-mata dimiliki anarkis. Tapi digunakan dari ideologi maupun berbagai latar belakang lainnya. Di Indonesia misalnya, peristiwa-peristiwa politik besar seperti jatuhnya orde lama dan orde baru diwarnai dengan demonstrasi. Begitu pula yang terjadi setelah era reformasi. Aksi 212 yang dilakukan kelompok Islam konservatif, menunjukkan demonstrasi mampu memberikan tekanan politik yang kuat (Argenti, 2019). Aksi itu berhasil menggolkan tuntutan untuk menurunkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta kala itu. Bahkan memenjarakan politisi yang dianggap menghina agama Islam itu. Padahal, Ahok hari itu merupakan teman dari Presiden Jokowi, sekaligus kader PDIP yang merupakan penguasa di eksekutif dan legislatif.

Meski bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi suksesnya sebuah tuntutan, demonstrasi pada sejarahnya berhasil membuat penguasa memberi perhatian atas persoalan sosial. Itu pula alasan kenapa demonstrasi menjadi metode penyampaian aspirasi secara massal yang kerap digunakan kelas sosial yang tersisihkan. Misalnya perjuangan warga Bara-Baraya di Makassar melawan penggusuran, masyarakat Bali menolak reklamasi, warga Rempang menolak Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City, dan bejibun contoh lainnya.

Di Makassar sendiri, saking seringnya demonstrasi digelar, kota itu dijuluki Kota Para Demontran (Abdullah & Al-Mustafa, 2019). Asri dan Ostaf dalam bukunya Kota Para Demontran, tidak hanya mendokumentasikan demonstrasi yang pernah ada di Makassar. Namun menegaskan bagaimana demonstrasi berhasil sebagai salah satu metode penyampaian aspirasi massal. Mulai dari penghadangan Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, penghadangann Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), perlawanan penggusuran warga Pandang Raya, warga Bara-Baraya, warga Kassi-kassi, dan perjuangan lainnya.

Berhasil di sini, dalam artian tidak semua tuntutan berhasil diwujudkan.

Seperti perlawanan warga Bara-Barayya, sebuah kampung kota di Makassar, meski kasusnya masih bergulir hingga rencana penelitian ini ditulis tapi menunjukkan demonstrasi dan berbagai metode advokasi yang mengiringinya berhasil membuat warga mempertahankan tanahnya selama bertahun-tahun.

Menurut Asri, demonstrasi yang banyak dimotori mahasiswa, menjadikan mahasiswa di kota yang dikenal pintu gerbang Indonesia Timur itu menjadi tidak cengeng dan menjalankan perannya sebagai intelektual. Mereka tidak takut pada mobil lapis baja, *water cannon*, gas air mata, jeruji besi, dan Terik matahari. Apalagi hanya sanksi skorsing dan *dropout*.

“Di Makassar, para pemberani jalanan dan pemimpin-pemimpin mahasiswa berada di garis depan barikade dan api menentang teriknya matahari. Sesekali dihujani peluru, tembakan mobil water cannonn, dan gas air mata” (Abdullah & Al-Mustafa, 2019).

Sementara itu, demonstrasi Peringatan Darurat adalah gerakan masyarakat sipil yang digelar pada Agustus 2024. Saat itu, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil menanggapi digodoknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Melalui revisi RUU Pilkada, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin menaikkan ambang batas presentase syarat pencalonan kepala daerah oleh partai dan menurunkan usia calon kepala daerah. Ambisi itu dinilai siasat Jokowi untuk meloloskan putranya, Kaesang Pangarep sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah (Diana, 2024).

Sebelum demonstrasi di berbagai kota yang dimulai pada 22 Agustus, di media sosial viral logo garuda berlatar biru, dengan narasi Peringatan Darurat. Aksi pun dilakukan spontan keesokan harinya, dan DPR batal menggolkan RUU tersebut (Diana, 2024).

Di Makassar sendiri, demonstrasi digelar sejak 22 Agustus hingga puncaknya di 26 Agustus. Hari itu, sejumlah jalan protokol di Makassar lumpuh. Terutama di sekitar jembatan layang menuju Jalan Urip Sumoharjo. Di jalan itu pula sebuah angkot terbakar. Polisi membubarkan paksa massa di malam hari. Beberapa massa aksi dipukul dan ditangkapi, bahkan dikejar hingga ke dalam kampus Universitas Bosowa (Unibos) dan Univeritas Muslim Indonesia (UMI).

Sementara di Jalan Pettarani, mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang berdemonstrasi di depan kampusnya mengalami hal serupa. Polisi masuk ke dalam kampus, sementara massa yang diduga bayaran di pihak polisi, ikut menyerang massa aksi. Mereka juga merusak fasilitas kampus. Kaca pecah, pelatarann yang dipersiapkan untuk lokasi wisuda keesokan harinya juga diporak-porandakan. Paramedis jalanan yang melengkapi diri dengan penanda medis, turut dipukuli hingga berdarah oleh polisi. LBH Makassar mencatat 33 massa aksi ditangkap (Mappiwali, 2024). Lalu beberapa waktu berselang, berbagai media daring baik lokal dan yang bermarkas di Jakarta menyebut segala kerusuhan hari itu karena kelompok anarko. Tentunya dengan mengutip pernyataann kepolisian.

B. Kajian Teori

1. Kekerasan Budaya

Teori kekerasan budaya diperkenalkan sosiolog asal Norwegia, Johan Galtung. Ini tidak sama dengan kekerasan verbal atau linguistik (Corsevski, 1998). Galtung merumuskan tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terbilang kasat mata, seperti pemukulan, pemerkosaan, genosida, dan sebagainya (Galtung, 1969).

Sementara untuk dua kekerasan lainnya terbilang berbeda dengan kekerasan langsung. Kekerasan struktural misalnya, adalah kekerasan yang terjadi karena struktur sosial yang ada tidak memenuhi hak-hak tertentu. Seperti kemiskinan yang terjadi karena tidak adanya pemenuhan hak ekonomi, atau sulitnya menjadi seorang pemimpin di wilayah tertentu karena kerja karena diskriminasi ras, kulit, gender, dan sebagainya. Berbeda dengan kekerasan langsung, kekerasan struktural ini tidak memiliki aktor individu (Galtung, 1969).

Selain kekerasan struktural, ada kekerasan kultural. Kekerasan ini merujuk pada aspek kebudayaan, seperti agama dan ideologi, bahasa, dan seni. Hal-hal tersebut dianggap bisa melegitimasi kekerasan, yang pada akhirnya menjadi bagian kekerasan itu sendiri. Tiga bentuk kekerasan ini pada dasarnya saling berkaitan dengan dimensi temporal. Kekerasan langsung sebagai *event*, kekerasan struktural adalah *process*, dan kekerasan kultural ialah *invariation* (Galtung, 1990).

Konsep *cultural violence* atau kekerasan kultural merupakan kelanjutan dari gagasan *structural violence* atau kekerasan struktural yang ia perkenalkan sebelumnya. Kekerasan kultural merujuk pada aspek-aspek budaya, termasuk ideologi, agama, bahasa, dan seni, yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural. Dalam konteks komunikasi, konsep ini relevan dalam memahami bagaimana wacana, simbol, dan representasi media dapat mempertahankan serta memperkuat struktur kekuasaan yang tidak adil. Galtung menunjukkan bahwa kekerasan kultural berperan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap kekerasan, menjadikannya tampak wajar atau bahkan bermoral.

Konsep ini tidak lahir dalam ruang hampa, Galtung dipengaruhi oleh tradisi pemikiran kritis Eropa yang melihat relasi antara ide, struktur sosial, dan kekuasaan. Galtung banyak dipengaruhi oleh tradisi teori kritis yang menekankan bagaimana ideologi bekerja melalui institusi budaya untuk mempertahankan dominasi. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik, tetapi sebagai proses legitimasi yang bekerja melalui sistem makna. Media, sebagai institusi budaya modern, menjadi ruang utama tempat legitimasi tersebut diproduksi dan disirkulasikan .

Jika ditilik, konsep ini beririsan dengan gagasan hegemoni Antonio Gramsci yang menekankan bagaimana dominasi dipertahankan melalui persetujuan simbolik, bukan sekadar paksaan (Hendarto, 1993; Patria & Arief,

2015). Meskipun Galtung tidak secara eksplisit merumuskan teorinya sebagai turunan langsung dari Gramsci, kesamaan logika terlihat pada penekanan terhadap legitimasi ideologis. Kekerasan budaya bekerja ketika nilai dan keyakinan tertentu diterima sebagai kebenaran umum yang tidak dipertanyakan (Galtung, 1990).

Galtung juga dipengaruhi oleh pemikiran non-Barat, terutama etika ahimsa dari Mahatma Gandhi. Prinsip non-kekerasan Gandhi memberi warna normatif pada gagasan Galtung tentang perdamaian positif—yakni perdamaian yang tidak hanya berarti ketiadaan perang, tetapi juga kehadiran keadilan sosial (Gandhi & Gandhi, 1939). Inspirasi ini terlihat dalam upayanya mengembangkan studi perdamaian sebagai disiplin yang tidak netral, melainkan berpihak pada transformasi konflik tanpa kekerasan (Galtung, 1969). Pengaruh Gandhi membantu Galtung memperluas kerangka analisisnya, dari sekadar kritik terhadap struktur menuju pencarian jalan etis dan praksis menuju perdamaian.

Di dalam perspektif komunikasi, kekerasan kultural dapat dianalisis melalui konstruksi pesan dan narasi dalam berbagai media. Galtung menekankan bahwa aspek budaya seperti bahasa dan simbol dapat membenarkan dominasi dengan membuatnya tampak alami (Galtung, 1990). Ketika media secara konsisten menggunakan label negatif terhadap kelompok tertentu, publik lebih mudah menerima tindakan represif terhadap kelompok tersebut. Dalam kerangka konseptual penelitian media, bahasa dipahami sebagai medium legitimasi, bukan sekadar alat komunikasi.

Representasi visual memperluas daya kerja kekerasan budaya karena citra memiliki kekuatan sugestif yang kuat. Pengaruh pemikiran simbolik dalam tradisi antropologi dan studi budaya turut membentuk cara Galtung melihat peran simbol dalam legitimasi kekerasan. Citra kekacauan atau kekerasan yang dipilih secara selektif dapat membangun asosiasi negatif yang stabil terhadap kelompok tertentu. Ketika visual tersebut direproduksi berulang kali, ia membentuk memori kolektif yang mendukung narasi dominan.

Konsep kekerasan budaya ini, sudah banyak digunakan dalam penelitian. Dalam konteks Indonesia, dimensi kekerasan budaya tampak jelas dalam produksi narasi pasca-1965. Buku *Kekerasan Budaya Pasca 1965* karya Wijaya Herlambang menunjukkan bagaimana rezim Orde Baru membangun legitimasi anti-komunisme melalui sastra, film, dan media massa (Herlambang, 2013). Narasi tentang “bahaya laten” diproduksi secara sistematis sehingga membentuk kesadaran kolektif yang mendukung eksklusi dan represi.

Di dalam analisisnya, Herlambang memperlihatkan bagaimana media berperan sebagai instrumen kekerasan budaya dalam konteks politik Indonesia. Kekerasan fisik memperoleh pembenaran simbolik melalui reproduksi makna yang konsisten. Dia menyoroti bagaimana karya akademik, kebijakan kebudayaan, hingga representasi dalam media massa ikut mengukuhkan legitimasi atas kekerasan yang telah terjadi (Herlambang, 2013).

Selain Herlambang, konsep kekerasan budaya tersebut juga digunakan dalam kajian feminisme. Di dalam perspektif feminis terhadap pemikiran

Galtung, menunjukkan bahwa kekerasan budaya menopang ketidaksetaraan gender melalui simbol dan stereotip yang dilembagakan (Eriyanti, 2017). Representasi perempuan dalam media yang mereduksi peran sosialnya menjadi bagian dari legitimasi subordinasi. Kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi dapat berupa penghapusan dan stereotipisasi yang diterima sebagai normal.

2. Teori Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara

Teori ini dicetuskan Louis Althusser, seorang filsuf Marxis asal Prancis yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam kajian ideologi, struktur sosial, dan politik. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang mencoba mereinterpretasi pemikiran Karl Marx dengan pendekatan strukturalis. Salah satu gagasannya yang paling terkenal adalah konsep *Ideological State Apparatuses* (ISA) atau Aparatus Ideologi Negara, yang dikembangkan dalam esai *Ideology and Ideological State Apparatuses* (1970). Dalam tulisan ini, Althusser menyoroti bagaimana ideologi bekerja dalam masyarakat untuk mereproduksi struktur sosial yang ada.

Karya-karya Althusser telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di Indonesia, media dan penerbit independen, IndoProgres menerbitkan bukunya dengan judul *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara*. Menurutnya, negara akan terus mempertahankan kekuasaannya melalui dua hal: *Repressive State Apparatuses* (RSA) dan *Ideological State Apparatuses* (ISA). RSA mencakup institusi seperti militer, polisi, dan sistem peradilan yang menggunakan represi fisik untuk menegakkan tatanan sosial. Sebaliknya, ISA mencakup institusi seperti sekolah, keluarga, media, dan agama yang bekerja secara lebih halus melalui ideologi untuk membentuk kesadaran individu agar menerima struktur sosial yang ada (Althusser, 2015). Konsep ini menandai pergeseran dari pemahaman klasik Marxis yang terlalu menekankan peran ekonomi dalam membentuk masyarakat, menuju analisis yang lebih kompleks tentang peran ideologi dalam reproduksi hubungan produksi.

Althusser berpendapat bahwa ideologi bukan sekadar alat propaganda, melainkan struktur yang menyusun realitas sosial. Individu tidak hanya terpengaruh oleh ideologi, tetapi juga secara aktif dibentuk olehnya melalui proses yang ia sebut sebagai "interpelasi." Dalam proses ini, individu dikenali dan mengidentifikasi diri mereka sebagai subjek dalam sistem yang ada, sehingga tunduk pada aturan sosial tanpa menyadarinya (Brewster & Althusser, 2001). Karenanya, ideologi tidak hanya membentuk pemikiran individu, tetapi juga perilaku mereka, menciptakan ilusi kebebasan yang sebenarnya dikendalikan oleh struktur yang lebih besar.

Salah satu ISA yang dianggap Althusser paling berpengaruh adalah sistem pendidikan. Ia berargumen bahwa sekolah memainkan peran sentral dalam mereproduksi hubungan produksi kapitalis dengan mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan oleh sistem tersebut (Brewster & Althusser, 2001). Melalui kurikulum dan praktik pendidikan, individu dibentuk

agar menerima hierarki sosial sebagai sesuatu yang alamiah dan tidak dapat diubah. Dengan kata lain, sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa generasi berikutnya tetap beroperasi dalam sistem yang sudah ada tanpa mempertanyakan struktur yang mendasarinya.

Di kondisi yang serba digital ini, ISA dalam konsepsi Althusser yang juga tak kalah pengaruhnya adalah media. Media tidak hanya sebagai alat menyampaikan pesan saja, tapi sebagai alat ideologis yang memperkuat dominasi kelas penguasa. Dengan menyebarkan wacana yang mendukung kepentingan dominan, media memastikan bahwa individu menginternalisasi norma-norma yang menopang sistem kapitalis (Althusser, 2015). Itu memperlihatkan bagaimana ideologi bekerja secara halus dan sering kali tidak disadari oleh individu yang menjadi bagian darinya.

Penelitian ini akan berfokus bagaimana media digunakan sebagai salah satu instrumen ISA. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir masyarakat. Baik melalui seleksi berita, framing wacana, dan penyebaran nilai-nilai ideologis yang mendukung status quo. Dengan demikian, media berperan dalam memastikan bahwa sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menguntungkan kelas berkuasa terus diterima tanpa perlawanan yang signifikan.

Media sering kali membingkai aktor politik atau kelompok tertentu sesuai dengan kepentingan ideologi dominan. Misalnya, protes atau gerakan sosial yang menentang kebijakan pemerintah bisa dilabeli sebagai “anarkis” atau “pengganggu ketertiban,” sementara kebijakan represif pemerintah digambarkan sebagai tindakan yang sah demi keamanan nasional. Dengan membentuk persepsi publik melalui konstruksi wacana semacam ini, media membantu mempertahankan legitimasi kekuasaan dan meredam potensi perlawanan dari masyarakat yang termarginalisasi.

Selain itu, media juga berperan dalam membentuk subjektivitas individu agar berfungsi sesuai dengan kepentingan sistem kapitalisme dan negara. Althusser menjelaskan bahwa ideologi bekerja dengan membuat individu menginternalisasi nilai-nilai yang menguntungkan kelas penguasa tanpa merasa dipaksa (Brewster & Althusser, 2001). Melalui tayangan hiburan, iklan, dan budaya populer, media menanamkan nilai-nilai konsumtif, individualisme, dan loyalitas terhadap negara, sehingga masyarakat lebih cenderung menerima struktur ekonomi dan politik yang ada.

3. Teori Propaganda

Pakar komunikasi politik, Dan Nimmo menggolongkan propaganda sebagai salah satu pendekatan persuasi politik (Nimmo et al., 1993). Sebuah cara untuk mengubah sikap dan perilaku orang. Menurut filsuf dan anarkis asal Prancis Jacques Ellul, propaganda adalah bentuk komunikasi yang bertujuan membentuk cara berpikir dan pola tindakan masyarakat. Menurutnya, propaganda tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan teknologi modern

yang membentuk kehidupan manusia sehari-hari.

Jika ditilik dari sejarahnya, propaganda telah digunakan sejak zaman kuno, seperti dalam Kekaisaran Romawi, Yunani, dan Tiongkok. Dalam Perang Dunia I dan II, propaganda digunakan secara luas untuk membentuk dukungan masyarakat terhadap perang melalui media cetak, radio, dan film (Chomsky & S. Herman, 2008). Bagi Ellul, di tengah perkembangan teknologi informasi yang makin pesat saat ini, propaganda tak terelakkan. Karenanya ia melihat propaganda sebagai fenomena. Di dalam propaganda modern, menurutnya tak terbatas pada propaganda politik, tetapi juga meresap dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam budaya konsumsi dan hiburan (Ellul, 2021).

Di era ini, seperti yang dikatakan Kovach dan Tom, bukan lagi banjir informasi. Tapi tsunami informasi (Kovach & Rosenstiel, 2006). Hal itu membuat peran media massa memiliki peran sangat penting dalam penyebaran propaganda, terutama karena punya kemampuan menjangkau audiens yang luas dengan cepat. Di titik itu, propaganda tidak hanya memengaruhi kondisi individu, tapi juga membentuk lingkungan komunikasi yang mendukung pesan tertentu. Arti lainnya, propaganda bekerja secara berkelanjutan dan sistematis, sulit pula diidentifikasi, sehingga individu tidak menyadari suatu pola yang telah dikondisikan (Ellul, 2021).

Ellul membagi dua jenis propaganda: politik dan sosiologis. Propaganda politik untuk memperoleh dukungan bagi rezim atau ideologi tertentu. Sementara yang satunya dilakukan lebih halus, dan bertujuan membentuk pola pikir jangka panjang. Ada pula dua konsep propaganda yang diperkenalkan Ellul. Pertama integrasi, tujuannya mempertahankan sistem sosial yang ada dengan menciptakan kesadaran kolektif yang stabil. Kedua agitasi, tujuannya untuk membangkitkan emosi dan menggerakkan massa menuju perubahan sosial atau revolusi. Konsep ini biasanya lebih eksplisit, dengan memanfaatkan simbol dan narasi yang menggugah perasaan massa (Ellul, 2021).

Selain Ellul, Noam Chomsky juga dikenal dengan gagasan propogandanya. Ahli Linguistik itu, bersama temannya, Edward S. Herman dalam buku "Manufacturing Consent" mengemukakan model propganda. Menurutnya, media pada dasarnya menggunakan lima filter dalam memproduksi berita. Model propaganda berfokus pada ketimpangan kekayaan dan kekuasaan, serta berbagai dampaknya yang bertingkat pada kepentingan dan pilihan media massa (Chomsky & S. Herman, 2008).

Berbeda di negara otoriter, dimana sensor terhadap berita sangat ketat. Sehingga untuk melihat bagaimana media dikontrol dan dimonopoli sangat jelas. Di negara yang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, sulit untuk melihat hal tersebut. Karena propaganda dan sensor bekerja tidak formal.

"Model (propaganda) ini menelusuri rute yang digunakan uang dan kekuasaan untuk menyaring berita yang layak untuk dicetak, meminggirkan perbedaan pendapat, dan memungkinkan pemerintah

dan kepentingan swasta yang dominan untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik,” (Chomsky & S. Herman, 2008).

Filter pertama adalah kepemilikan. Perusahaan media massa merupakan perusahaan besar, karenanya prioritas utama mereka adalah keuntungan. Lalu loyalitas jurnanisme untuk publik akan jadi urusan kedua. Filter kedua iklan. Dalam hal ini, pengiklan punya pengaruh terhadap produk media. Filter ketiga elit media, Chomsky menyebut media tergantung pada informasi yang disediakan oleh pemerintah, bisnis, dan "pakar" yang didanai dan disetujui oleh sumber-sumber dan agen-agen kekuasaan utama. Keempat flak, atau tekanan. Bisa berupa kekerasan langsung, gugatan hukum, atau segala tindakan yang membuat media was-was memberitakan hal yang kritis. Lalu filter kelima adalah anti komunisme. Chomsky menyebut anti komunisme sebagai agama nasional dan mekanisme kontrol.

Namun dalam hal ini, anti komunisme yang dimaksud saya asumsikan segala ideologi yang menjadi anti tesis dari ideologi yang dominan. Ketika media menciptakan musuh bersama. Dalam hal ini adalah anarkisme.

4. Hegemoni

Hegemoni berasal dari akar kata *eugemonia* yang merupakan bahasa Yunani. Menurut Encyclopedia Britannica dalam (Patria & Arief, 2015), pada praktiknya di jaman Yunani, kata *eugemonia* digunakan untuk menunjukkan dominasi posisi. Dewasa ini, salah satu contohnya adalah perang pengaruh antara China dan Amerika Serikat. Merujuk ke belakang, yakni perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Mereka bertarung untuk menjadi kekuatan hegemonik dunia untuk agenda tertentu.

Hegemoni sangat lekat dengan nama Antonio Gramsci, filsuf Italia yang juga pendiri dan pemimpin Partai Komunis Italia. Tapi sebenarnya konsep hegemoni, menurut Robert Bocoock dalam (Patria & Arief, 2015) pertama kali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang Marxis, Georgy Valentinovich Plekanov. Konsep itu digunakan Valentinovich untuk menggulingkan pemerintahan Tsar kala itu. Definisi hegemoni dalam artian ini, merujuk pada kepemimpinan hegemoni proletariat. Mereka yang sama-sama punya visi untuk menggulingkan Tsar, baik borjuis kritis, petani, dan intelektual.

Selanjutnya, itu dijadikan Vladimir Lenin basis material untuk perjuangan politiknya. Ia menekankan kesadaran politik bagi para pekerja. Menurutnya, pekerja atau proletar perlu dicekoki kesadaran politis. Baik dilakukan secara teoritis, propagandis, agitator, maupun organisator. Pada dasarnya, hegemoni menurutnya adalah soal kepemimpinan

Konsep itulah yang mengilhami Gramsci dalam teori hegemoninya. Ia menegaskan basis supremasi kelas. Menurutnya, hegemoni bukan hanya soal kepemimpinan, tapi jug dominasi. Konsep ini menyiratkan tiga hal. Pertama dominasi dilakukan atas seluruh musuh dan kepemimpinan dilakukan untuk semua sekutu. Kedua, kepemimpinan merupakan prakondisi menaklukkan

aparatus negara. Ketiga, sekali kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek kelas ini, baik pengarahan ataupun dominasi terus berlanjut.

Menurut Gramsci, dominasi diperoleh kekuasaan melalui persetujuan dan bukan sekadar pemaksaan. Kelas penguasa menggunakan institusi seperti sekolah, media, dan agama untuk membentuk cara berpikir masyarakat sehingga mereka menerima status quo tanpa perlawanan berarti. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga bersifat persuasif.

Konsep ini berhubungan erat dengan kegagalan revolusi di Italia pada awal abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia I. Saat itu, kelas pekerja dan partai-partai kiri, termasuk Partai Komunis Italia, gagal menggulingkan kapitalisme meskipun kondisi ekonomi dan sosial sangat mendukung perubahan. Berbeda dengan Rusia yang berhasil melakukan Revolusi Bolshevik pada tahun 1917, di Italia kelas pekerja tidak memiliki kesadaran revolusioner yang cukup kuat untuk melawan hegemoni kelas borjuis. Ini menunjukkan bahwa dominasi kapitalisme tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga pada pengaruh ideologi (Patria & Arief, 2015).

Gramsci melihat negara borjuis di Italia tidak hanya menggunakan alat-alat represif seperti polisi dan militer (yang disebutnya sebagai "kekuasaan langsung" atau dominasi politik), tetapi juga berhasil mengendalikan kesadaran masyarakat melalui institusi budaya. Hal ini menciptakan ilusi bahwa sistem kapitalis adalah sesuatu yang alami dan tidak dapat diubah. Akibatnya, meskipun kaum pekerja mengalami eksploitasi, mereka tetap menerima sistem tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Inilah yang membuat revolusi proletar di Italia gagal terjadi.

Sebagai tanggapan terhadap kegagalan ini, Gramsci mengusulkan konsep "perang posisi" dalam perjuangan kelas. Ia menyadari bahwa revolusi langsung atau perang manuver seperti yang terjadi di Rusia tidak akan berhasil di negara-negara dengan struktur masyarakat yang lebih kompleks seperti Italia. Oleh karena itu, perjuangan harus dilakukan melalui perang posisi, yaitu dengan merebut dominasi ideologis melalui media, pendidikan, dan organisasi sosial sebelum melakukan perubahan politik.

Karenanya, ia berkesimpulan kegagalan revolusi di Italia tidak hanya disebabkan oleh kekuatan militer negara, tetapi juga oleh keberhasilan kelas penguasa dalam mempertahankan hegemoninya. Gramsci menunjukkan bahwa tanpa perjuangan di ranah budaya dan ideologi, revolusi tidak akan bisa bertahan lama. Karenanya, perubahan sosial tidak bisa hanya mengandalkan kekerasan atau pemberontakan, tetapi juga harus melibatkan pertempuran panjang dalam membentuk kesadaran dan pemikiran masyarakat.

Salah satu alat utama mempertahankan hegemoni kelas penguasa melalui media. Melalui media, ideologi dominan disebarkan dan diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga mereka secara tidak sadar menyetujui dan mendukung sistem yang ada. Media tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk cara berpikir dan

nilai-nilai sosial. Sehingga media digunakan untuk mengontrol kesadaran publik tanpa perlu menggunakan kekuatan fisik secara langsung.

Tapi di sisi lain, ia menekankan media bukan hanya alat propaganda pemerintah atau kapitalis, tetapi juga medan pertempuran ideologis. Artinya, kelompok-kelompok yang menentang hegemoni dapat menggunakan media sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan rakyat. Oleh karena itu, keberadaan media alternatif atau kritis sangat penting dalam upaya melawan hegemoni. Jika media hanya dikuasai oleh kelas penguasa, maka wacana yang berkembang akan selalu menguntungkan mereka dan menutup kemungkinan munculnya pandangan lain yang menantang sistem yang ada.

5. Konstruksi Realitas

Teori konstruksi realitas sangat lekat dengan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Sosiolog yang dikenal dengan konsep konstruksionisme. Menurutnya, realitas sosial bukan sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi manusia, terutama melalui bahasa dan simbol (Berger & Luckmann, 2018).

Di dalam konteks media, ini berarti bahwa berita, opini, dan informasi yang disampaikan bukan sekadar cerminan fakta objektif, tetapi hasil dari proses seleksi, interpretasi, dan penyajian oleh jurnalis dan lembaga media. Setiap informasi yang disampaikan media selalu melewati proses konstruksi yang dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu (Eriyanto, 2020).

Berdasar dari itu, Eriyanto dalam bukunya Analisis Framing menegaskan realitas tidak dioper begitu saja. Namun terdapat interaksi antara jurnalis dan fakta. Di titik itu, peristiwa yang sama bisa ditulis dengan berbeda, karena dikonstruksi berbeda oleh jurnalis. Misalnya dalam aksi demonstrasi, jurnalis melihatnya sebagai bagian dari hak konstitusional, tapi jurnalis lain bisa melihatnya sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Karenanya, berita dalam konstruksi sosial bukan cerminan dari realita atau fakta yang ada.

Eriyanto menguraikan bahwa framing dalam media adalah bentuk konstruksi realitas yang terjadi melalui pemilihan kata, sudut pandang, serta penekanan aspek tertentu dari sebuah berita. Melalui cara ini, media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan membangun kesadaran kolektif mengenai suatu isu. Misalnya, dalam pemberitaan politik, media dapat membingkai seorang tokoh sebagai pahlawan atau penjahat tergantung pada kepentingan editorialnya. Hal ini menunjukkan bahwa berita bukan sekadar laporan objektif, melainkan representasi realitas yang telah dibentuk melalui proses sosial dan budaya tertentu.

Pada praktiknya, proses ini terjadi melalui tiga tahap utama: eksternalisasi (penciptaan makna sosial oleh individu atau kelompok), objektivasi (pembentukan makna sebagai sesuatu yang dianggap nyata oleh masyarakat), dan internalisasi (penerimaan makna tersebut oleh individu sebagai bagian dari realitas mereka).

Lebih jauh, konstruksionalisme dalam media juga mencerminkan hubungan antara media dan kekuasaan. Menurut Eriyanto, media sering kali menjadi alat bagi kelompok dominan untuk mempertahankan status quo atau mempromosikan ideologi tertentu. Baginya, media tidak hanya memberitakan suatu peristiwa, tetapi juga memberikan makna yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu (Eriyanto, 2020).

Pada intinya, realitas tak bisa dipindahkan begitu saja (Berger & Luckmann, 2018). Oleh karena itu, pemahaman terhadap framing menjadi penting bagi masyarakat agar tidak menerima informasi secara pasif, tetapi mampu menganalisis bagaimana realitas dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2020).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian kekerasan terhadap anarko melalui media, sebagaimana konsep kekerasan budaya menurut Johan Galtung pada dasarnya belum pernah dilakukan. Namun ada sejumlah penelitian yang relevan. Penelitian ini menjadi rujukan penulis untuk melihat kebaruan penelitian, dan selanjutnya merumuskan pertanyaan penelitian. Selain itu memudahkan penulis baik dari segi konsep maupun teoritis. Berikut ini sejumlah penelitian yang relevan dimaksud:

1. Penelitian yang dilakukan (Aden Suryana, 2022) berjudul "Representasi Kelompok Anarko di Media: Bias Media Atas Pemberitaan Kalangan Anarko dan Paham Anarkisme." Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis model Nourman Fairlaucgh. Sebuah model analisis teks dengan menelusuri wacana dari praktik sosial.

Menggunakan alat itu, peneliti menganalisis representasi kalangan Anarko di media arus utama. Terutama dalam pemberitaan demonstrasi. Hasil penelitiannya, kelompok Anarko selalu ditampilkan sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam menciptakan kerusuhan, sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pemberitaan negatif terhadap Anarko telah menciptakan stigma, sehingga masyarakat tidak menerima kelompok tersebut.

2. Hampir serupa dengan penelitian (Aden Suryana, 2022), penelitian yang dilakukan (Pahalmas, 2016) dengan judul "Makna Anarkisme di Media Pemberitaan Online" juga menggunakan analisis wacana. Namun dengan model berbeda. Penelitian ini menggunakan analisis wacana model Van Dijk yang dikenal dengan kognisi sosial. Model tersebut menekankan pada psikologi sosial. Sehingga tidak hanya menganalisis teks semata, tapi juga melihat latar belakang bagaimana teks itu dihasilkan.

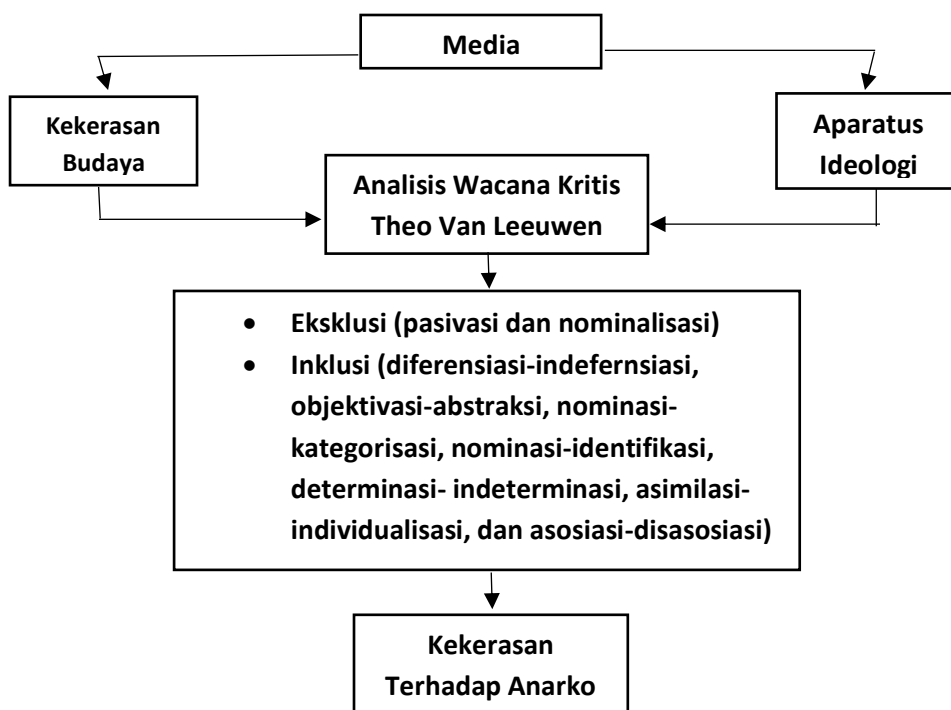
Penelitian ini menemukan bahwa Antara.com dalam merekonstruksi Berita demonstrasi di Maret 2015 menggunakan kata anarkisme secara keliru. Baik jika itu ditinjau dari filsafat, sosial, hingga ekonomi dan politiknya. Hal tersebut, dianggap menggiring pembaca pada makna yang tidak tepat. Sehingga pembaca terjebak pada kesalah pahaman bahwa anarkisme dan

kelompok anaarko adalah sesuatu yang negatif.

3. Penelitian (Puspito Putra, 2013) berjudul “Pemahaman Wartawan Media Cetak Makassar Terhadap Penggunaan Istilah Anarkisme Dalam Berita” lebih mendalam dari dua penelitian sebelumnya. Penelitian ini dalam bentuk skripsi ini, menggunakan studi kasus berita aksi penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Makassar pada 2013. Kasus ini menarik karena merupakan peristiwa penting yang kerap dibahas. Namun dilihat dari sudut pandang berbeda.

Puspito menelusuri Pemahaman wartawan terhadap istilah anarkisme dan apa alasannya menggunakan Istilah tersebut. Dua hal itu mejadi pertanyaan penelitian yang dijawab dengan kompherensif melalui wawancara mendalam dan ditopang data lainnya. Hasilnya, ia menganggap pemberitaan dimaksud menggunakan kata anarkisme secara keliru. Namun ia berkesimpulan hal tersebut dilakukan wartawan karena ketidak tahaun. Bukan karena tidak ada tendensi ideologis.

D. Kerangka Konseptual



E. Batasan Konseptual

1. Anarkisme: Ideologi politik yang menentang negara dan kapitalisme. Paham yang menganggap kepemilikan pribadi sebagai curian, dan menilai negara sebagai sesuatu yang destruktif atau merusak.
2. Jurnalisme: Sebuah proses mencari, mengelola, dan menyebarkan Berita. Berita dimaksud adalah yang dibutuhkan warga agar bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri.
3. Berita: Laporan cepat yang dianggap penting atau menarik untuk kebanyakan orang. Ia tidak netral dan cenderung dipengaruhi kekuasaan.
4. Peringatan Darurat: Gerakan demonstrasi masyarakat sipil yang menolak revisi UU Pilkada. Karena dinilai mengukuhkan dinasti Presiden ke-7 Jokowi. Aksi ini digelar di berbagai kota, dan diwarnai kekerasan dari aparat.
5. Demonstrasi: Metode untuk menyampaikan aspirasi secara massal. Sebuah cara yang kerap digunakan kelompok yang tersisihkan atau tak punya kuasa untuk menyampaikan pendapat.